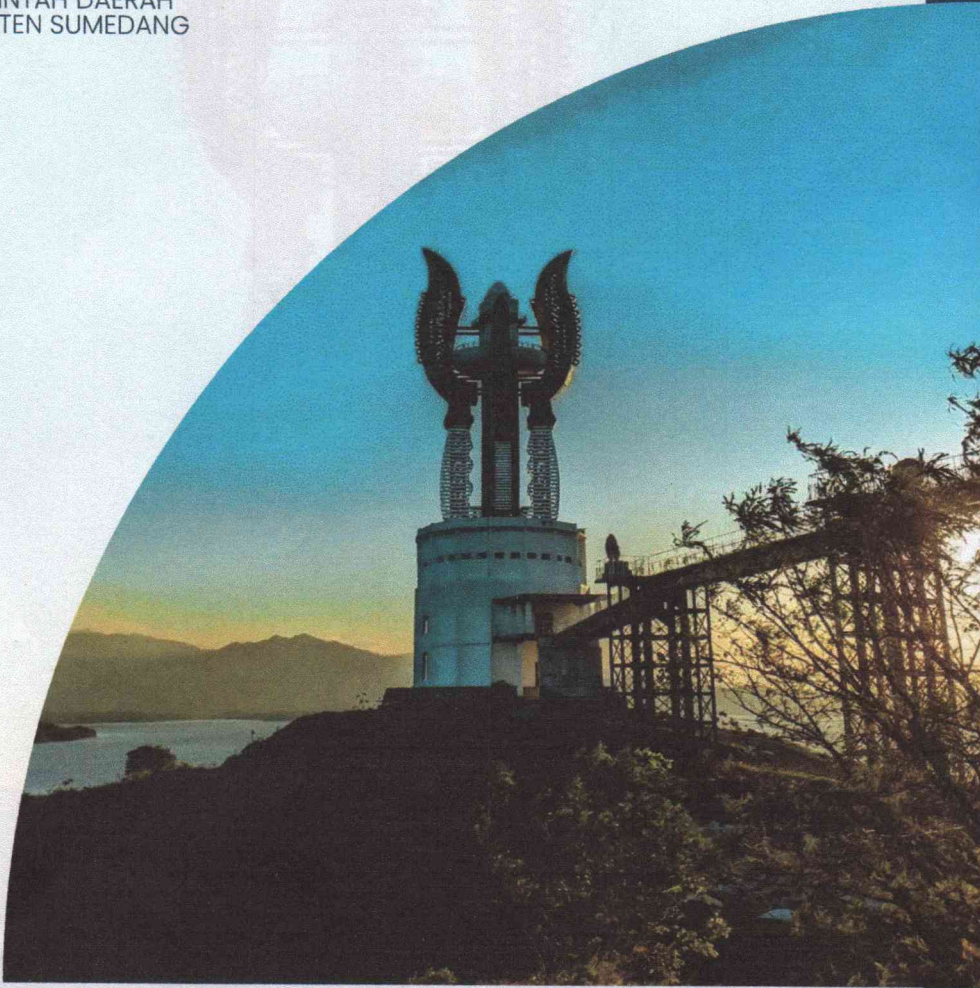




Insan medal

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



2
0
2
4

PERUBAHAN RENJA

PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPPEDA TAHUN 2024



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Follow Us :
@bappedasumedang



BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2024

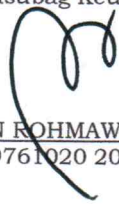
Pada hari ini tanggal 2 Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 yang dihadiri Tim Penyusun, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sumedang/Keputusan Kepala Perangkat Daerah, **terlampir**.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :


<i>Kesatu</i>	:	Sistematika Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 telah memperhatikan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Substansi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah memuat: 1) program, kegiatan dan sub kegiatan; 2) indikator kinerja; 3) lokasi kegiatan; dan 4) pagu indikatif serta prakiraan maju yang diestimasikan;
<i>Kedua</i>	:	Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 telah selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024;
<i>Ketiga</i>	:	Rancangan Akhir Perubahan Renja Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 yang telah diverifikasi akan dijadikan lampiran Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasubag Keuangan



DIDIN ROHMAWAN, A.Md
NIP. 19761020 200604 1 010

Tim Verifikasi


Dian F
NIP. 19840305 201001 2 020

Mengetahui,

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kab. Sumedang


H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si
NIP. 197104011997101001

RESUME KASUS

ASAS KLINIS DAN PATOFISIOLOGI PADA PENYAKIT JANTAN PULSA

KEPERAWATAN DAN PENYAKIT JANTAN PULSA

Asas klinis dan patofisiologi pada penyakit jantian pulsa. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang jaringan otot jantung. Gejala klinis yang sering ditemukan adalah nyeri dada, sesak napas, dan penurunan tekanan darah. Patofisiologi dari penyakit ini berkaitan dengan inflamasi dan nekrosis miokardium yang mengganggu fungsi pompa jantung.

Gejala Klinis	Patofisiologi
Nyeri dada	Nyeri dada disebabkan oleh inflamasi dan nekrosis miokardium yang mengganggu fungsi pompa jantung.
Sesak napas	Sesak napas disebabkan oleh inflamasi dan nekrosis miokardium yang mengganggu fungsi pompa jantung.

Keperawatan pada penyakit jantian pulsa meliputi pemantauan vital signs, pemberian obat-obatan, dan dukungan psikologis.

Keperawatan pada penyakit jantian pulsa meliputi pemantauan vital signs, pemberian obat-obatan, dan dukungan psikologis.



BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2024

Pada hari ini tanggal 2 Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 yang dihadiri Tim Penyusun, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sumedang/Keputusan Kepala Perangkat Daerah, *terlampir*.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :

<i>Kesatu</i>	:	Sistematika Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 telah memperhatikan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Substansi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah memuat: 1) program, kegiatan dan sub kegiatan; 2) indikator kinerja; 3) lokasi kegiatan; dan 4) pagu indikatif serta prakiraan maju yang diestimasikan;
<i>Kedua</i>	:	Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 telah selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024;
<i>Ketiga</i>	:	Rancangan Akhir Perubahan Renja Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 yang telah diverifikasi akan dijadikan lampiran Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasubag Keuangan

DIDIN ROHMAWAN, A.Md
NIP. 19761020 200604 1 010

Tim Verifikasi

Diah F
NIP. 19840305 201001 2 020

Mengetahui,

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kab. Sumedang
Kepala,

H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si
NIP. * 197104011997101001



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMEDANG
JALAN PERUMAHAN KEMBARAN KEMBARAN KEMBARAN

Survei dan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Sumedang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai keadaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di lingkungan Universitas Sumedang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

No	Judul Penelitian
1	Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Mutu Terhadap Kinerja Organisasi
2	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan

Survei dan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Sumedang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai keadaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di lingkungan Universitas Sumedang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.




 Nama :
 NIM :

Tanggal :
 NIM :

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2024

Pada hari ini tanggal 2 Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 yang dihadiri Tim Penyusun, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sumedang, *terlampir*.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :

Kesatu	:	Sistematika Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 telah memperhatikan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Substansi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah telah memuat: 1) program, kegiatan dan sub kegiatan; 2) indikator kinerja; 3) lokasi kegiatan; dan 4) pagu indikatif serta prakiraan maju yang diestimasikan;
Kedua	:	Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 telah selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024;
Ketiga	:	Rancangan Akhir Perubahan Renja Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 yang telah diverifikasi akan dijadikan lampiran Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasubag Keuangan

DIDIN ROHMAWAN, A.Md
NIP. 19761020 200604 1 010

Tim Verifikasi

Dian F
NIP. 19790503 20001 2020

Mengetahui,

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kab. Sumedang
Kepala,



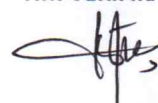
H. AGUS WAHIDIN, S.Pd. M.Si
NIP. 197104011997101001

FORMAT PENGENDALIAN
VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH :

NO	URAIAN	KESESUAIAN		CATATAN/TINDAK LANJUT
		ADA	TIDAK ADA	
1	Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024			
2	Sistematika sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017:			
	BAB I PENDAHULUAN			
	1.1. Latar Belakang	✓		
	1.2. Landasan Hukum	✓		
	1.3. Maksud dan Tujuan	✓		
	1.4. Sistematika Penulisan	✓		
	BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II			
	2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	✓		Judul sesuai dan dg uraian
	2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	✓	✗	Judul pindah ke depan dilanjut tabel dan analisis
	2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	✓		
	BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	✓		
	BAB IV PENUTUP	✓		
3	Tabel-tabel:			
	Tabel 2.1. Evaluasi Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II	✓		
	Tabel 3.1. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Hasil Input SIPD-RI)	✓		Judul tabel tidak
	Tabel 3.2. Rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan serta Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 (kertas kerja dalam bentuk excel)		✓	ditolong & lengkapi

TIM VERIFIKASI



Dian Fitriy



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 85 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 DAN
DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen rencana tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sesuai tahapan dan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. melakukan pengendalian atas penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

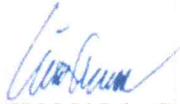
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025 DAN DOKUMEN
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 DAN
DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Sekretariat :
- Ketua : Kepala Subbagian Umum pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- Anggota : 1. Lurry Handhayani, S.P.
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Subbagian Keuangan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
2. Aning Tias Mauliana, S.IP.
(Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada Subbagian Keuangan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);

3. Sutaryo
(Operator SIPD pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan
4. Budi Adhinata, S.Kom.
(Operator SIPD pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang).

D. Kelompok Kerja I : Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- Anggota :
1. Robi Gustiawan, S.Sos.
(Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 2. Cucu, S.E. M.M.
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 3. Dian Fitry, S.P.
(Analisis Data Ilmiah Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan
 4. Gilang Ramadhan, S.Kom.
(Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang).

E. Kelompok Kerja II : Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Anggota...

- Anggota : 1. Deni Suhandani, S.Si., M.Si.
(Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
2. Rika Kantini, S.T., M.Si.
(Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
3. Rudi Suhendar, S.E.
(Analisis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan
4. Lia Agustiani, S.Sos.
(Analisis Perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang).
- F. Kelompok Kerja III : Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Ketua : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Anggota : 1. Andi Agustina, S.Pt., M.E.
(Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
2. Nandang Mu'min, S.E., M.M.
(Perencana Ahli Muda pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
3. Ratih Yuniarti, S.E., M.Si.
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan
4. Rohaedi, S.Sos.
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang).

- G. Kelompok Kerja IV : Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Anggota :
1. Siti Asyarah, S.T., M.Si.
(Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 2. Taopik Hidayat, S.T., M.I.L.
(Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 3. Sumirta, S.Hut., M.I.L.
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 4. Dear Rizki Nugraha, S.T.
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
 5. Niken Sukma K, S.T.
(Analisis Pemanfaatan Ruang pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan
 6. Rifka Anggraeni, S.IP.
(Analisis Program Pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang).
- H. Kelompok Kerja V : Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Anggota :
1. Omay Komara Nurjaman, S.T., M.M.
(Peneliti Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang); dan

2. Nugrahana Fitria Ruhyana, S.P., M.E.
(Peneliti Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

A. Ketua mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan setiap tahapan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024; dan
2. melaksanakan pembahasan bersama seluruh kelompok kerja dan anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

B. Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dalam koordinasi setiap tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumedang Tahun 2024 kepada seluruh kelompok kerja dan anggota tim.

C. Sekretariat

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dengan seluruh anggota Tim; dan
- b. mencermati Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan Dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

2. Anggota...

2. Anggota mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan persiapan perumusan dan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024;
 - b. melakukan orientasi mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - e. mempedomani Surat Edaran Bupati Sumedang tentang Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - f. memfasilitasi penyusunan Dokumen Rancangan Awal, Rancangan, Dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 dan penyusunan Rancangan, Rancangan Akhir Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
 - h. menyampaikan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang untuk diverifikasi;
 - i. menyempurnakan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan hasil verifikasi;
 - j. menyampaikan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang bahan penetapan untuk diajukan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

D. Kelompok Kerja I Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan seluruh anggota Tim;
 - b. melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2023 lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan seluruh anggota Tim;
 - c. melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan seluruh anggota Tim; dan

d. melaporkan...

d. melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- c. melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

E. Kelompok Kerja II Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan seluruh anggota Tim;
- b. melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2023 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan seluruh anggota Tim;
- c. melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan seluruh anggota Tim; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- c. melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

F. Kelompok Kerja III Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan seluruh anggota Tim;

b. melakukan...

- b. melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2023 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan seluruh anggota Tim;
- c. melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan seluruh anggota Tim; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- c. melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

G. Kelompok Kerja IV Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan seluruh anggota Tim;
- b. melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2023 lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan seluruh anggota Tim;
- c. melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan seluruh anggota Tim; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- c. melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

H. Kelompok Kerja V Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan seluruh anggota Tim;
 - b. melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2023 lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan seluruh anggota Tim;
 - c. melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan seluruh anggota Tim; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:
 - a. merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - c. melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah disusun berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan rencana Kerja BAPPPEDA Sumedang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran Pembangunan nasional dan daerah. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2024.

Sumedang, Agustus 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG,



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.S

KATA PENGANTAR

Perencanaan Badan Perencana Pembangunan dan Pengembangan
Dapat diartikan sebagai pedoman pada pembuatan Master Plan Regenerasi No. 16 Tahun
2017 tentang Tata Cara, Nilai, Kaidah, Kebijakan, Strategi, dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019 tentang Kriteria, Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perencanaan sebagai Kerangka Kerja BAP/PPDA Sumedang bertujuan untuk memberikan ketekunan
dan konsistensi antara pemerintah, pembangunan, pelaksanaan, dan pengawasan
pelayanan serta efisiensi pelaksanaan pembangunan dan layanan pembangunan nasional dan
daerah. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 ini, diharapkan
kembali yang terencana dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dapat
terlaksana dan menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024.

Sumedang, Agustus 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA.....	31
BAB IV PENUTUP.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Bappppeda Sumedang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun ke-satu pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Sumedang, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kabupaten Sumedang, dokumen ini juga merupakan sebagai instrumen dalam menjelaskan muatan-muatan yang terkandung pada RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan "Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD." Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah." Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah (Bappppeda) Kabupaten Sumedang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Bappppeda Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024 serta RPD 2024-2026. Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024 yang disebabkan oleh : (1) Adanya prioritas kegiatan yang mendorong tercapainya indikator utama Pemerintahan Kabupaten Sumedang yaitu penurunan Stunting, Penanganan Kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024. Salah satu implikasi dari hal

tersebut adalah adanya perubahan pagu indikatifnya, termasuk pada Bappppeda Kabupaten Sumedang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Perubahan Renja Bappppeda kabupaten Sumedang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 - 15 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 16 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 17 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanganan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 - 18 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - 19 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - 20 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 - 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
 - 28 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 - 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 30 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
- 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 - 32 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
 - 33 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 29);
 - 34 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 - 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
 - 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 - 37 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
 - 38 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 - 39 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur

- Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
- 40 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 66).
 - 41 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42).
 - 42 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 26)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Bappppeda Kabupaten Sumedang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappppeda Kabupaten Sumedang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Bappppeda Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada perubahan RKPD Kabupaten Sumedang.
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappppeda Kabupaten Sumedang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024.

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappppeda kabupaten Sumedang Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang akan dijelaskan kedalam empat bab, sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang Pendahuluan atau Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Sumedang

BAB II. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini akan menguraikan tentang kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Bappppeda) sampai dengan triwulan II yang mengacu pada APBD tahun 2024

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV. Penutup

Bab ini akan menjelaskan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik perhatian dalam tahapan pelaksanaan atau ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah dalam pelaksanaan, serta rencana tidak lanjutnya

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappppeda Sampai Triwulan II Tahun 2024

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappppeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur.
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
3. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi.
4. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan.
5. Layanan informasi tata ruang wilayah.
6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

Upaya Bappppeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan dari berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam hal Perencanaan.
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif.
3. Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah.
4. Meningkatnya Konsistensi antara dokumen Perencanaan dengan mekanisme penganggaran.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappppeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat Substantif terkait Perencanaan.
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan.
3. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Hasil evaluasi Renja Bappppeda Kabupaten Sumedang tahun sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Dengan jumlah pagu Rp. 12.067.382.804, jumlah penyerapan Rp. 5.927.901.476 sehingga capaian penyerapan dan capaian kinerja sebesar 49,12%.

II. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 11 Sub Kegiatan. Dengan jumlah pagu 1.775.000.000,00.- jumlah penyerapan 776.090.200,00 sehingga capaian penyerapan dan capaian kinerja sebesar 43,72%

III. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia (PPM) dengan Pagu sebesar 510.992.000,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 8 Sub Kegiatan. Dengan jumlah pagu penyerapan 202.657.329,00 sehingga capaian penyerapan dan capaian kinerja sebesar 39,66%.

IV. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 8 (delapan) Subkegiatan. Dengan jumlah pagu 982.000.000,00 jumlah penyerapan 569.445.400,00 sehingga capaian penyerapan dan capaian kinerja sebesar 57,99%

V. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 3 Sub Kegiatan. Dengan jumlah pagu 800.000.000,00.- jumlah penyerapan 309.648.040,00 sehingga capaian penyerapan dan capaian kinerja sebesar 38,71%.

VI. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Bidang Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang dilaksanakan melalui 4 (empat) Kegiatan dengan jumlah Pagu 1.192.500.000,00

jumlah penyerapan 1.192.500.000,00 sehingga capaian penyerapan dan capaian kinerja sebesar 19,78% Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappppeda Sumedang sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPPEDA Kabupaten Sumedang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Keluaran Kegiatan(Output)	Bappppeda Target Kinerja Capaian Program (RPD Tahun 2024-2026)	Realisasi Target Kinerja Program Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-2)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan Renja 2023(n-1)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra S.D Tahun 2023		Keterangan
						Target Capaian Program/Kegiatan Renja 2024	Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi tk Capaian Kinerja s.d Triwulan II	Tingkat Capaian Capaian kinerja s.d Triwulan II	
3	URUSAN PERENCANAAN	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9=5+7	10=9/3	11
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	AA kategori	BB	A	A					
01,201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	6 laporan	6 laporan	6 laporan	3	50%	3	17%	
01,201,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	7 dokumen	5 dok (Renstra, Renja.M, Renja.P, Probis, RUP)	5 dok (Renstra, Renja.M, Renja.P, Probis, RUP)	3	60%	3	20%	
01,201,02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	1 dokumen	1 dok (RKA,KAK, SOP,MR)	1 dok (RKA,KAK,SOP,M)	1	100%	1	33%	
01,201,03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	1 dokumen	1 dok (RKA,KAK, SOP,MR)	1 dok (RKA,KAK,SOP,M)	0	0%	0	0%	

01,201,04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	1 dokumen	1 dok (RKA,KAK, SOP,MR)	1 dok (RKA,KAK,SOP, M)	1	100%	1	33%
01,201,05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	1 dokumen	1 dok (RKA,KAK, SOP,MR)	1 dok (RKA,KAK,SOP, M)	1	100%	1	33%
01,201,06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	Dokumen	25 dokumen	8 dok (Lap.kinerja, LKPJ, LPPD, SAKIP, SPIP, RB, ZI, SKM)	8 dok (Lap.kinerja, LKPJ, LPPD, SAKIP, SPIP, RB, ZI, SKM)	4	50%	4	17%
01,202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Keuangan	9	Dokumen	3 laporan	3 laporan	3 laporan	1	33%	1	11%
01,202,01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	174	Orang	58 Orang	58 Orang	58 Orang	28	48%	28	16%
01,202,03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	0%	0	0%
01,202,07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36	Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6	50%	6	17%
01,203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD Perangkat Daerah	12	Laporan	2 laporan	2 laporan	4 laporan	2	50%	2	17%
01,203,01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1	50%	1	17%

01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen	-	-	1 Dokumen	0	0%	0	0%
01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	Dokumen	-	-	12 Laporan	6	50%	6	17%
01,203,06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6	50%	6	17%
01,205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Laporan	5 laporan	5 laporan	4 laporan	2	50%	2	17%
01,205,02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	1 paket	1 paket	1 paket	0	0%	0	0%
01,205,03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1	25%	1	8%
01,205,09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9	orang	3 orang	3 orang	3 orang	2	67%	2	22%
01,205,11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	270	orang	90 orang	90 orang	90 orang	90	100000%	90	33%
01,206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	24	Laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	4	50%	4	17%
01,206,02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	1 paket	1 paket	1 paket	1	100000%	1	33%

01,206,03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1	10000%	1	33%
01,206,04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0	0%	0	0%
01,206,05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0	0%	0	0%
01,206,06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	84	Dokumen	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	0	0%	0	0%
01,206,09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6	50%	6	17%
01,206,10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1	100%	1	33%
01,206,11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1	100%	1	33%
01,207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	9	Laporan	3 laporan	4 laporan	3 laporan	3 laporan	1		1	11%
01,207,02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit		1 unit	1 unit	1 unit	1	100%	1	33%
01,207,05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	Unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	1	100%	1	3%
01,207,06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	Unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	5	50%	5	17%

01,207,10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	1 unit	1 unit	1 unit	0	0%	0	0%	0	0%
01,208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	9	Laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	0	0%	0	0%	0	0%
01,208,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	12 laporan	12 laporan	1 laporan	0	0%	0	0%	0	0%
01,208,03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Laporan	2 laporan	2 laporan	1 laporan	0	0%	0	0%	0	0%
01,208,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Laporan	5 laporan	5 laporan	1 laporan	0	0%	0	0%	0	0%
01,209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12	Laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	0	0%	0	0%	0	0%
01,209,02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	111	Unit	37 unit	37 unit	37 unit	15	41%	15	41%	15	14%
01,209,06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	276	Unit	92 unit	92 unit	92 unit	40	43%	40	43%	40	14%
01,209,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	1 unit	1 unit	1 unit	0	0%	0	0%	0	0%
01,209,10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1	100%	1	100%	1	33%

5,01,02,201,07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	9	Dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1	33%	1	11%
5,01,02,202	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah data yang digunakan dalam perencanaan</i>	9	Laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan				0%
5,01,02,202,01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	Dokumen	1 masukan	1 masukan	1 Dokumen	0	0%	0	0%
5,01,02,202,02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	84	Orang	28 orang	28 orang	28 orang				0%
5,01,02,202,03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	21	Buku	7 buku	7 buku	7 buku				0%
5,01,02,203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan	3	Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0		0	0%
5,01,02,203,03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	24	Laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	4	50%	4	17%
5,01,03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. <i>Persentase Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>		petsen	94,01	94,51	95,00				
		2. <i>Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA</i>		petsen	84,23	84,65	85,06				
		3 <i>Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>		petsen	90,07	90,89	91,55				

5,01,03,202,06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6	Laporan	2 laporan	2 laporan	1	50%	1	17%	
5,01,03,202,07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6	Laporan	1 laporan	2 laporan	1	50%	1	17%	
5,01,03,202,08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		Laporan	7 dokumen	4 Laporan	2	50%	2	#DIV/0!	
5,01,03,203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Persentase Capaian kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>		persen	89,65	91,45				#DIV/0!	
5,01,03,203,01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	Dokumen	0	2 Dokumen	1	50%	1	17%	
5,01,03,203,02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6	Laporan	2 Dinas	2 laporan	1	50%	1	17%	
5,01,03,203,03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6	Laporan	0	2 laporan	1	50%	1	17%	
5,01,03,203,04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	12	Laporan	1 laporan	4 laporan	2	50%	2	17%	

5,05,02,201,12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	3	laporan	1 dokumen	1 laporan	0	0	0	0	0%	0	0%
5,05,02,202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	6	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1	50%	1	17%	0%	1	17%
5,05,02,202,02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	0	0%	0%	0	0%
5,05,02,202,04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	3	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	0	0%	0%	0	0%
5,05,02,202,09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	3	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	0	0%	0%	0	0%
5,05,02,202,10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	0	0%	0%	0	0%
5,05,02,203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	9	Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	0	0%	0	0%	0%	0	0%
5,05,02,203,04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	0	0%	0%	0	0%
5,05,02,203,05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	3	Dokumen	0	1 dokumen	0	0%	0	0%	0%	0	0%
5,05,02,203,10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	3	dokumen	0	1 dokumen	0	0%	0	0%	0%	0	0%
5,05,02,204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	6	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0%	0	0%	0%	0	0%

5,05.02.204 ,10	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0%	0	0%
5,05.02.204 ,04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3	Laporan	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	0	0%	0	0%

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan adalah sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	URUSAN WAJIB	6.995.000.000,00	3.081.098.400,00	49,27	Sangat Rendah	44,05	Sangat Rendah
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.775.000.000,00	776.089.700,00	43,96	Sangat Rendah	43,72	Sangat Rendah
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.775.000.000,00	776.089.700,00	33,33	Sangat Rendah	43,72	Sangat Rendah
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.575.000.000,00	727.140.200,00	0,00	Sangat Rendah	46,17	Sangat Rendah
	Analisis kondisi Daerah, Permasalahan dan isu Strategis Pembangunan Daerah	10.000.000,00	5.056.000,00		Sangat Rendah	50,56	Sangat Rendah
	Kondisi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya	10.000.000,00	-	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	30.000.000,00	24.908.000,00		Sangat Rendah	83,03	Tinggi

	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	30.000.000,00	25.428.400,00		Sangat Rendah	84,76	Tinggi
	Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/Kota	280.000.000,00	266.120.000,00		Sangat Rendah	95,04	Sangat Tinggi
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrembang Kecamatan	30.000.000,00	23.130.000,00		Sangat Rendah	77,10	Tinggi
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.185.000.000,00	382.497.800,00		Sangat Rendah	32,28	Sangat Rendah
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	95.000.000,00	25.689.100,00	50,00	Sangat Rendah	27,04	Sangat Rendah
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	14.459.000,00	3.710.200,00	50,00	Sangat Rendah	25,66	Sangat Rendah
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	63.648.000,00	20.436.600,00	50,00	Sangat Rendah	32,11	Sangat Rendah
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	16.893.000,00	1.542.300,00	50,00	Sangat Rendah	9,13	Sangat Rendah
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	105.000.000,00	23.260.400,00	50,00	Sangat Rendah	22,15	Sangat Rendah
	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	105.000.000,00	23.260.400,00	50,00	Sangat Rendah	22,15	Sangat Rendah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.292.992.000,00	1.081.750.769,00	55,59	Rendah	47,18	Sangat Rendah
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	510.992.000,00	202.657.329,00	51,25	Rendah	39,66	Sangat Rendah
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	30.636.600,00	10.704.200,00	50,00	Sangat Rendah	34,94	Sangat Rendah
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	21.820.500,00	10.827.400,00	50,00	Sangat Rendah	49,62	Sangat Rendah
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pemerintahan	56.472.100,00	-	25,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pemerintahan	83.315.800,00	37.618.800,00	60,00	Rendah	45,15	Sangat Rendah
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	94.756.600,00	19.330.900,00	40,00	Sangat Rendah	20,40	Sangat Rendah

	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	21.820.600,00	10.849.400,00	50,00	Sangat Rendah	49,72	Sangat Rendah
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	74.664.500,00	25.790.600,00	60,00	Rendah	34,54	Sangat Rendah
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	127.505.300,00	87.536.029,00	75,00	Sedang	68,65	Sedang
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	982.000.000,00	569.445.400,00	51,75	Rendah	57,99	Rendah
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	41.000.000,00	13.413.900,00	47,00	Sangat Rendah	32,72	Sangat Rendah
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	45.500.000,00	17.816.000,00	49,00	Sangat Rendah	39,16	Sangat Rendah
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	37.000.000,00	15.631.200,00	42,00	Sangat Rendah	42,25	Sangat Rendah
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	513.500.000,00	334.029.700,00	76,00	Tinggi	65,05	Rendah
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	34.000.000,00	10.974.500,00	46,00	Sangat Rendah	32,28	Sangat Rendah
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	42.000.000,00	16.990.000,00	48,00	Sangat Rendah	40,45	Sangat Rendah
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	31.000.000,00	12.511.400,00	40,00	Sangat Rendah	40,36	Sangat Rendah
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	238.000.000,00	148.078.700,00	66,00	Sedang	62,22	Rendah
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	800.000.000,00	309.648.040,00	63,77	Rendah	38,71	Sangat Rendah
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	200.000.000,00	45.130.300,00	60,00	Rendah	22,57	Sangat Rendah
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	200.000.000,00	126.552.340,00	81,00	Tinggi	63,28	Rendah
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	400.000.000,00	137.965.400,00	50,31	Sangat Rendah	34,49	Sangat Rendah

5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.192.500.000	236.176.400	54,58	Rendah	19,81	Sangat Rendah
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.192.500.000,00	236.176.400,00	54,58	Rendah	19,81	Sangat Rendah
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100.000.000,00	74.525.000,00	100,00	Sangat Tinggi	74,53	Sedang
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	100.000.000,00	74.525.000,00	100,00	Sangat Tinggi	74,53	Sedang
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	482.500.000,00	130.109.400,00	78,33	Tinggi	26,97	Sangat Rendah
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	171.250.000,00	54.984.000,00	60,00	Rendah	32,11	Sangat Rendah
	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olah raga	200.000.000,00	49.271.000,00	75,00	Sedang	24,64	Sangat Rendah
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga kerja	111.250.000,00	25.854.400,00	100,00	Sangat Tinggi	23,24	Sangat Rendah
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	200.000.000,00	30.210.000,00	30,00	Sangat Rendah	15,11	Sangat Rendah
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100.000.000,00	30.210.000,00	60,00	Rendah	30,21	Sangat Rendah
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	100.000.000,00	-	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	410.000.000,00	1.332.000,00	10,00	Sangat Rendah	0,32	Sangat Rendah
	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	400.000.000,00	1.332.000,00	20,00	Sangat Rendah	0,33	Sangat Rendah
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	10.000.000,00		0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah

Memperhatikan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024, maka terhadap kegiatan-kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanya dibawah 50% akan di lakukan skala prioritas untuk kegiatan yang mendorong dalam penangan nstunting, kemiskinan ekstrim dan peningkatan pendapatan keluarga. Adapun kegiatan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2024, sehingga output-output kegiatan baru akan dicapai pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2024. Dapat disimpulkan capaian target kinerja program/kegiatan Renja Tahun 2024 akan tetap selaras dengan target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil terhadap hal tersebut diatas adalah tetap menjaga konsistensi target-target kinerja perencanaan dan penganggaran dan melakukan penyesuaian/perubahan kerangka pendanaan Renja terutama terhadap target kinerja kegiatan yang telah terpenuhi namun alokasi anggarannya masih tersedia maupun penambahan alokasi anggaran pada target kinerja yang belum terlampaui melalui mekanisme pergeseran antar program/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sebagai perangkat daerah dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksana tugas teknis perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis perencanaan, dan pembinaan dibidang perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bappppeda Kabupaten Sumedang didukung dengan potensi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas aparatur perencana.
2. Kurangnya ketersediaan data secara terpadu untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
3. Belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dan Penganggaran.
4. Belum efektifnya sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
5. Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan sebagai landasan perencanaan pembangunan.

Melihat permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappppeda Kabupaten Sumedang di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Bappppeda dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :

1. Peran Bappeda sebagai perencana pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Sehingga produk yang dihasilkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.
2. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan kualitas sumber daya perencana dengan berbekal keterbatasan jumlah sumber daya aparatur perencana.
3. Ketersediaan sistem informasi berbasis teknologi informasi sangat menunjang dalam penyusunan produk-produk perencanaan
4. Keterpaduan database perencanaan
5. Masih adanya pemahaman sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan dan proses perencanaan pembangunan yang dianggap formalitas.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Perubahan (RKPD-P) Tahun 2024 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun tujuan RPD Kabupaten Sumedang 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, dan pendekatan tematik, holistik, , integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD).

Sesuai hasil evaluasi, Perubahan Renja Bappppeda Tahun 2024, lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran. Perubahan anggaran tersebut dilakukan akibat adanya optimalisasi pengalokasian anggaran dalam mencapai target pembangunan, sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai.

Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Sumedang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagaimana tabel 3.1 berikut:

KODE	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN AKTIVITAS SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN				BERKURANG/ BERTAMBAH	SUMBER PENDANAAN	KET.
			LOKASI	TARGET	PAGU (Rp)	PAGU (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU (Rp)	PAGU (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10-7)	12	13	
5	UNSUBUR PUNUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Kab. Sumedang		22.569.260.906	RKPD/RENJA TAHUN 2024 (pergeseran terakhir)	Kab. Sumedang		19.791.104.804	2.463.230.000	APBD KAB, APBD PROV, APBN (DAK)	SUB KEGIATAN (TETAP/BERGESER/BAJU/LANJUT AN)	
5	01 PERENCANAAN				21.113.260.906		Kab. Sumedang		18.598.604.804	2.463.230.000			
5	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A	14.462.010.906	12.067.382.804	Kab. Sumedang	A	13.145.112.804	1.077.730.000			
5	01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sumedang	6 laporan	138.465.085	117.396.700	Kab. Sumedang	6 laporan	117.396.700	-	APBD Kabupaten		
5	01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	46.373.250	43.849.700		5 Dokumen	43.849.700	-		Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan	

5	01	01	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.419.835	9.763.800	9.763.800	1 Dokumen	9.763.800	-	-	Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan
5	01	01	01	03	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.457.250	6.184.400	6.184.400	1 Dokumen	6.184.400	-	-	Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan
5	01	01	01	04	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.378.250	4.536.400	4.536.400	1 Dokumen	4.536.400	-	-	Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan
5	01	01	01	05	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.698.250	6.570.100	6.570.100	1 Dokumen	6.570.100	-	-	Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan
5	01	01	01	06	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	53.138.250	46.492.300	46.492.300	8 Dokumen	46.492.300	-	-	Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan
5	01	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Keuangan	3 laporan	8.616.824.332	8.632.156.604	8.612.556.604	3 laporan	8.812.556.604	180.400.000	APBD Kabupaten	

5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor yang Disediakan	1 paket	183.971.464	90.083.000			105.083.000	15.000.000		Kegiatan Lanjutan
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		1 paket								Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	28 dokumen	31.930.800	33.738.000			41.988.000	8.250.000		Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan
							28 dokumen								Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	550.000.000	301.542.000			551.542.000	250.000.000		Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan
							12 laporan								Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	33.000.000	20.347.200			20.347.200	-		Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan
							1 dokumen								Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	75.989.188	15.000.000			15.000.000	-		Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan
							1 dokumen								Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	988.824.664	399.386.300		Kab. Sumedang	649.386.300	250.000.000	APBD Kabupaten	
							3 laporan								
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	304.430.000							Aktivitas Sub Kegiatan Baru
							1 Unit								Aktivitas Sub Kegiatan Baru

5	01	01	01	01	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 unit	113.333.000	202.030.000	1 Paket	202.030.000		Aktivitas Sub Kegiatan Baru	
5	01	01	01	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 unit	571.061.664	197.356.300	197.356.300	20 Unit	347.356.300	150.000.000	Aktivitas Sub Kegiatan Baru	
5	01	01	01	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	-	-	-	1 Unit	100.000.000	100.000.000	Sub Kegiatan Baru, Aktivitas Sub Kegiatan Baru	
5	01	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang	3 laporan	1.466.889.980	1.291.785.000	1.453.665.000,	3 laporan	1.453.665.000,	161.880.000		
5	01	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	188.816.980	175.451.000		1 laporan	250.451.000	75.000.000	Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan	
5	01	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 laporan	117.073.000	80.000.000		1 laporan	95.000.000	15.000.000	Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan	
5	01	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan	1.161.000.000	1.036.334.000		1 laporan	1.108.214.000	71.880.000		
5	01	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sumedang	4 laporan	1.126.722.664	568.020.000		4 laporan	720.520.000	152.500.000		

5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizimannya	37 unit	327.580.000	248.430.000			37 unit	335.930.000	87.500.000	Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	92 unit	66.000.000	60.000.000			92 unit	75.000.000	15.000.000	Aktivitas Sub Kegiatan Lanjutan
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	136.053.464	54.910.000			1 unit	104.910.000	50.000.000	Aktivitas Sub Kegiatan Baru
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	597.089.200	204.680.000			2 Unit	204.680.000	-	Aktivitas Sub Kegiatan Baru
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN , PENGENDALIA N DAN EVALUASI PEMBANGUNA N DAERAH	Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Program pembangunan daerah	97,78%	2.277.000.000	1.775.000.000	Kab. Sumedang			2.160.500.000	385.500.000	APBD KAB.
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan pendanaan	3 dokumen	1.885.000.000	1.575.000.000	Kab. Sumedang			1.895.500.000	320.500.000	APBD KAB.
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan,	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	1 dokumen	50.000.000	10.000.000				10.000.000	-	

5	01	02	2.01	02	02	dan isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 dokumen	35.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	320.500.000	APBD KAB.	Aktivitas Baru dan Lanjutan
5	01	02	2.01	03	03	Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 berita acara	100.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000			
5	01	02	2.01	04	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah/Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah/Perangkat Daerah	54 berita acara	50.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000			
5	01	02	2.01	05	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 berita acara	400.000.000	280.000.000	280.000.000	280.000.000			
5	01	02	2.01	06	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1371 usulan	50.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000			
5	01	02	2.01	07	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMID/RKPD)	3 dokumen	1.200.000.000	1.185.000.000	1.505.500.000	1.505.500.000	320.500.000	APBD KAB.	Aktivitas Baru dan Lanjutan
5	01	02	2.02	02	02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Jumlah data yang digunakan dalam perencanaan	3 laporan	139.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000		APBD KAB.	

5	01	02	2.02	01	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	30.000.000	14.459.000				10.459.000	(4.000.000)	APBD KAB.	Aktivitas Lanjutan
5	01	02	2.02	02	Peminaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	28 orang	84.000.000	63.648.000				76.558.000	12.910.000	APBD KAB.	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	7 buku	25.000.000	16.893.000				7.983.000	(8.910.000)	APBD KAB.	Aktivitas Lanjutan
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan	1 laporan	253.000.000	105.000.000		Kab. Sumedang	8 laporan	170.000.000	65.000.000	APBD KAB.	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan daerah	8 laporan	253.000.000	105.000.000			8 laporan	170.000.000	65.000.000	APBD KAB.	Aktivitas Sub Kegiatan Baru

5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 laporan	50.000.000	21.820.500	21.820.500	2 laporan	21.820.500	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 laporan	150.000.000	56.472.100	56.472.100	2 laporan	56.472.100	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 laporan	150.000.000	83.315.800	183.315.800	4 laporan	183.315.800	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	2 dokumen	300.000.000	94.756.600	294.756.600	2 dokumen	294.756.600	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	50.000.000	21.820.600	21.820.600	2 Laporan	21.820.600	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan

5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	2 laporan	500.000.000	74.664.500		2 laporan	174.664.500	100.000.000	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 laporan	250.000.000	127.505.300		4 laporan	227.505.300	100.000.000	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan dan SDA	98,47 Persen	1.012.500.000	982.000.000		98,47 Persen	1.182.000.000	200.000.000	APBD KAB	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang dikordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	2 dokumen	76.500.000	41.000.000		2 dokumen	41.000.000	-	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	2 laporan	78.500.000	45.500.000		2 laporan	45.500.000	-	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan

5	01	03	2.02	03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 laporan	61.000.000	37.000.000	37.000.000	2 laporan	37.000.000	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	01	03	2.02	04	03	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	247.500.000	513.500.000	663.500.000	4 Laporan	150.000.000	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	01	03	2.02	05	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	67.500.000	34.000.000	34.000.000	2 dokumen	-	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	01	03	2.02	06	03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 laporan	67.500.000	42.000.000	42.000.000	2 laporan	-	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	01	03	2.02	07	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 laporan	51.000.000	31.000.000	31.000.000	2 laporan	-	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan

5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	363.000.000	238.000.000	4 Laporan	288.000.000	50.000.000	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	91,45 Persen	1.611.750.000	800.000.000		1.100.000.000	300.000.000	APBD KAB	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	2 Dokumen	30.000.000						
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	25.000.000						
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	25.000.000						

5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 laporan	550.000.000	200.000.000	Kab. Sumedang	4 laporan	225.000.000	25.000.000	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	2 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	487.850.000	200.000.000	Kab. Sumedang	4 laporan	450.000.000	250.000.000	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Baru
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 laporan	438.900.000	400.000.000	Kab. Sumedang	4 laporan	425.000.000	25.000.000	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan

5	05								1.456.000.000	1.192.500.000	90,90 Persen	1.192.500.000		APBD KAB	
5	05	02							1.456.000.000	1.192.500.000	- Sangat Inovatif Kategori - 90,90 Persen	1.192.500.000		APBD KAB	
5	05	02	2.01						150.000.000	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		APBD KAB	
5	05	02	2.01	12					150.000.000	100.000.000	1 laporan	100.000.000		APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	05	02	2.02						375.000.000	482.500.000	2 Dokumen	482.500.000		APBD KAB	
5	05	02	2.02	01					125.000.000	171.250.000	1 dokumen	171.250.000		APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	05	02	2.02	04					125.000.000	200.000.000	1 dokumen	200.000.000		APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	05	02	2.02	09					125.000.000	111.250.000	1 dokumen	111.250.000		APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan

5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3 Dokumen	282.000.000	200.000.000	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	-	APBD KAB	
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dokumen	150.000.000	100.000.000	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	-	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 dokumen	132.000.000	100.000.000	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	-	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 Dokumen	649.000.000	410.000.000	410.000.000	2 Dokumen	410.000.000	-	APBD KAB	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	599.000.000	400.000.000	400.000.000	1 dokumen	400.000.000	-	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbang	1 laporan	50.000.000	10.000.000	10.000.000	1 laporan	10.000.000	-	APBD KAB	Sub Kegiatan Tetap - Aktivitas Lanjutan

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan sampai dengan Triwulan II Bappppeda Kabupaten Sumedang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah tahun pertama, pertengahan periode RPD 2024-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana perubahan ini akan dijadikan sebagai pedoman/ acuan bagi Bappppeda Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/ kegiatan SKPD tahun 2024.

Sumedang, 2024

Kepala BAPPPEDA

Kabupaten Sumedang,



H. Agus Wahidin, S.Pd., M.Si.